

**DAMPAK PEMILU TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT
PERBANKAN**

Aryanti Sariartha

Universitas Widyatama

aryanti.sariartha@widyatama.ac.id

Alfiana

Universitas Widyatama

alfiana.dra@widyatama.ac.id

Vincentia Wahyu Widajatun

Universitas Widyatama

vincentia.wahju@widyatama.ac.id

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejadian politik pemilihan umum terhadap pertumbuhan kredit industri perbankan di Indonesia periode Desember 2007-November 2012. Penelitian melibatkan seluruh bank di Indonesia. Dengan menggunakan variabel *dummy* pada masa pemilu diperoleh hasil bahwa pemilihan umum mempengaruhi perilaku industri perbankan khususnya pemberian kredit. Data *time series* menunjukkan perilaku bank yang memberikan kredit lebih tinggi pada dua bulan sebelum pemilu, pada saat pemilu, dan pada dua bulan setelah pemilu. Hasil studi konsisten dengan variabel pemilu yang bersumber dari regresi probit beberapa variabel indikator ekonomi seperti indeks harga saham gabungan (IHSG), inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS. Hasil studi juga konsisten setelah model regresi melibatkan variabel kontrol rasio kecukupan modal, rasio likuiditas, rasio *contagion*, dan *bank run*. Hasil studi ini menemukan

pemilu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit industri perbankan. Studi ini mendukung beberapa studi terdahulu yang memprediksi adanya perilaku bank dalam pemberian kredit pada masa-masa pemilihan umum.

Kata kunci: pemilu, pertumbuhan kredit bank, pemberian kredit

Pendahuluan

Pemilu merupakan suatu kejadian politik yang penting bagi setiap negara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum (pemilu) berdampak terhadap perilaku bank dan kinerja bank (Baum et al., 2009; Cole 2009; Jackowicz, 2011) Namun penelitian yang dilakukan di Indonesia (Morics and Sjöholm, 2014) menemukan bukti yang tidak signifikan dari adanya pemilihan umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Aktivitas politik dalam suatu negara memiliki keterkaitan yang cukup kuat. Ketika aktivitas politik memberikan risiko politik maka akan berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi. Sebaliknya jika aktivitas politik tersebut tidak mendatangkan risiko, akan berdampak positif terhadap perekonomian. Sebagai contohnya adalah pesta demokrasi atau pemilihan umum yang secara langsung memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Semakin baik suasana demokrasi suatu negara dianggap positif mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah kondisi industri perbankan.

Hubungan politik dengan industri perbankan telah banyak menjadi fokus dalam penelitian. Industri perbankan dapat memperoleh kendala dari kejadian politik. Maududy (2015) menjelaskan bahwa Bank Indonesia memprediksi perputaran uang selama pelaksanaan serentak pemilihan kepala daerah (Pilkada)

pada akhir tahun 2015 memberikan sumbangan kepada perkenomian Indonesia sebanyak 0,3%.

“Pilkada diyakini akan mendorong konsumsi masyarakat, seperti belanja untuk kampanye. Sektor perdagangan, jasa, komunikasi, dan transportasi juga akan tumbuh positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat saat kampanye Kepala Daerah. Pada sektor itu pula penyaluran kredit perbankan akan tinggi pada sektor-sektor tersebut....”

Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk mengetahui dampak dari keputusan pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung terhadap industri perbankan.

Indonesia mempunyai sejarah pemilu yang tidak masuk dalam golongan demokrasi. Pada tahun 2005 pilkada baru dilakukan dengan sistem demokrasi sejak adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pilkada pertama dilaksanakan pada Juni 2005. Baru pada tahun 2007 Pilkada masuk dalam siklus Pemilu, sehingga secara resmi mengalami perubahan nama menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilukada. Pada tahun 2011 berdasarkan UU No. 15 tahun 2011 istilahnya berubah menjadi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun pada tahun 2014 DPR RI merumuskan bahwa pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejarah tersebut memberikan gejolak bagi kondisi politik di Indonesia. Hal yang penting untuk diuji secara empiris bagaimana dampak dari Pilkada dan Pemilu terhadap industri perbankan. Hal ini disebabkan kondisi persaingan politik di Indonesia yang masih banyak terdapat praktik “*money politics*” menyebabkan banyak biaya untuk keperluan kampanye. Sebagian sumber untuk keperluan kampanye tersebut banyak berasal dari pinjaman bank yang diajukan oleh calon-calon kandidat. Selain itu terdapat juga argumen yang menyatakan bahwa

semakin demokrasi yang berada pada level menengah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Barro, 1996). Argumen lain yang menyebabkan tingginya pertumbuhan kredit dengan adanya pemilu adalah *political pressure* yang dihadapi manajemen bank (Brown *et al.*, 2005 dalam Jackowicz *et al.*, 2011).

Penelitian ini akan membahas fenomena tersebut ke dalam lima bagian, pertama adalah latar belakang, bagian kedua adalah kajian literatur, ketiga metode penelitian, keempat berisikan hasil penelitian dan pembahasan, kelima menutup hasil temuan dalam kesimpulan.

Landasan Teori

Sejarah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 2014 merupakan salah satu indikator Demokrasi di Indonesia telah berhasil. Pada masa Orde Baru Pemilihan Umum dilakukan tidak secara langsung dan masih rahasia, sehingga satu rezim dapat berkuasa hingga lebih dari dua periode. Pada masa tersebut Indonesia dianggap belum memasuki masa demokrasi melainkan otoritarian. Pemilihan kepala daerah juga tidak dilakukan secara langsung sehingga momen pemilihan kepala daerah secara langsung dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 10 kali (Kompas.com). Mulai dari pemilu pertama di tahun 1955 sampai 2009. Pemilu yang terjadi tahun 2014 merupakan pemilu ke-11. Dalam pemilu pertama tahun 1955 masyarakat memilih anggota DPR dan Konstituante. Pemilu kedua tahun 1971 atau pemilu pertama setelah masa Orde Baru, pada

pemilu ini banyak indikator demokrasi yang tidak terpenuhi sehingga banyak pengamat politik yang tidak menggolongkan pemilu periode tersebut sebagai sistem demokrasi. Pemilu ketiga tahun 1977 sistem yang digunakan proporsional sama dengan periode 1971. Pemilu keempat terlaksana pada tanggal 1982 yang memilih 364 anggota parlemen sedangkan 96 orang lainnya dipilih presiden. Pemilu kelima berlangsung tahun 1987 juga memilih anggota parlemen dan pemenangnya masih partai Golkar sebagai partai penguasa. Terdapat 500 kursi yang tersedia, 400 dipilih secara langsung, dan 100 dipilih oleh Presiden Soeharto. Sistem yang dijalankan sama dengan pemilu tahun 1982, yaitu Proporsional dengan *Varian-Party List*. Pemilu keenam tahun 1992 dengan pemenangnya adalah partai Golkar.

Pada tahun 1997 pada pemilu ketujuh atau pemilu terakhir pada rezim Orde Baru dengan sistem yang sama yaitu *Proporsional-Varian Party list*. Namun kondisi saat itu tidak kondusif karena banyak menuai protes atas kecurangan dalam pemilu. Berikutnya, pemilu kedelapan terjadi tahun 1999 dimana sistem yang digunakan adalah Demokrasi Liberal di bawah pimpinan B.J. Habibie. Partai yang menang untuk parlemen adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), namun pemilihan presiden dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pemilu kesembilan pada tahun 2004. Dalam Pemilu ini untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih sendiri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pemilu ini dipilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan partai pemenang akan memperoleh kursi proporsional dengan hasil di tiap daerah. Tahun 2009 merupakan pemilu kesepuluh atau pemilu ketiga setelah reformasi.

Pada pemilu ini dipilih anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai anggota parlemen dan juga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Untuk kedua kalinya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai pemenang, namun pada periode ini dengan Prof. Dr. Boediono sebagai wakil presiden.

Pemilu kesebelas yang terlaksana pada tahun 2014 merupakan pertarungan politik yang sangat kompetitif karena hanya menampilkan dua kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilu kali ini Indonesia benar-benar diuji sistem demokrasinya. Pemilihan umum untuk kedua kalinya memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung. Hasilnya pada pemilu kali ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pemenang. Masyarakat internasional turut menaruh perhatian pada kontes politik ini. Sebab kedua calon dianggap dapat memberi harapan baru bagi masyarakat Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.

Pemilihan Umum/Demokrasi dan Pertumbuhan Kredit Bank

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan demokrasi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Barro, 1996; Cole, 2009; Jackowicz, 2011) meski beberapa studi menemukan tidak signifikan (Acemoglu *et al.*, 2008; Morics and Sjöholm, 2014). Saat para kandidat memutuskan untuk turut dalam kompetisi politik maka akan banyak dana yang dikeluarkan untuk kampanye partai maupun kandidat. Investasi yang dikeluarkan oleh calon anggota legislatif sebesar Rp 750 juta- 1 miliar per caleg DPR dan sebesar Rp 250-500 juta per caleg DPRD provinsi. Berdasarkan dana tersebut maka setiap calon perlu mengalokasikan dana baik dari dana sendiri maupun kredit atau dari sponsor politiknya.

Aktivitas kampanye akan memberikan dampak bagi beberapa industri seperti industri kertas dan percetakan, industri tekstil dan pakaian, transportasi dan telekomunikasi, industri manufaktur, hotel dan restoran, jasa iklan. Sedangkan berdasarkan data periode pemilu sebelumnya, sektor yang bertumbuh pesat menjelang pemilu adalah transportasi dan komunikasi, listrik, gas, dan air bersih, jasa konstruksi, pertanian, dan keuangan. Sektor-sektor yang berada dalam satu rantai nilai dari sektor tersebut. Pertumbuhan di sektor tersebut dapat meningkatkan lapangan kerja. Pada pemilu 2014 terdapat 2,48 juta orang yang dapat memperoleh kesempatan kerja dengan 217 ribu kesempatan kerja di sektor industri tekstil dan pakaian jadi, 170 ribu di sektor transportasi dan telekomunikasi, dan 113 ribu di sektor industri kertas dan percetakan.

Jika ada data yang mendukung bahwa dampak ekonomi dari pemilu positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun ada pula yang menyatakan tidak ada dampak positif pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada argumen semakin ketatnya pengawasan terhadap pemilu. Kampanye terbuka juga semakin sedikit karena peserta pemilu yang sedikit. Selain itu pertumbuhan teknologi menyebabkan biaya kampanye menjadi lebih murah dengan adanya jejaring sosial.

Penelitian yang sudah terdapat sebelumnya menemukan dampak demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi (Barro, 1996; Tavares dan Wacziarg, 2001; Acemoglu et al., 2008). Studi yang dilakukan Barro (1996) menemukan bahwa demokrasi pada level menengah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi demokrasi yang mengalami peningkatan pada level tertentu dapat mengalami pertumbuhan yang tinggi, namun jika sudah demokrasi level tinggi

maka pertumbuhan akan semakin kecil. Tavares and Wacziarg (2001) menemukan fakta bahwa jalur meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari demokrasi adalah lewat akumulasi sumber daya manusia. Semakin suatu negara dalam level demokrasi yang baik maka semakin tinggi peningkatan kualitas pendidikan sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil studi lain oleh Acemoglu (2008) menemukan tidak terdapat pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian empiris yang menguji hubungan atau dampak pemilu terhadap pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum banyak dilakukan. Pemilihan umum merupakan salah satu indikator demokrasi. Salah satu penelitian yang dilakukan tentang dampak pemilihan umum adalah penelitian Moricks and Sjöholm (2014) dengan metode *quasi-experimental research*. Penelitian tersebut dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang pertama kali memilih kepala daerah secara langsung dan wilayah yang belum pernah melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan pada kejadian politik pilkada tidak ada dampak dari pilkada langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinç (2005) menemukan bahwa selama pemilu pertumbuhan volume pinjaman bank-bank BUMN lebih tinggi dibandingkan bank swasta. Penelitian lain yang menguji tekanan politik terhadap industri perbankan Micco et al. (2006), Baum et al. (2009), dan Cole (2009) menemukan hasil empiris yang beragam. Penelitian Baum et al. (2009) menemukan bahwa bank yang beroperasi di Turki mengalami perubahan perilaku dari adanya pemilihan umum, namun bukti empiris menunjukkan terdapat

penurunan pertumbuhan kredit selama periode sebelum pemilihan anggota parlemen. Hal yang berbeda ditemukan dalam studi Cole (2009) yang menemukan bahwa kredit pertanian di India mengalami peningkatan pada bank-bank pemerintah selama periode pemilu. Penelitian yang menunjukkan peningkatan kredit pada bank-bank selama masa pemilu (Dinç, 2005; Micco et al., 2006, 2007; Cole, 2009) dijelaskan dengan hipotesis tekanan politik (*political pressure*) dan peningkatan permintaan modal dalam ekonomi yang terstimulasi dari fiskal. Tekanan politik merupakan salah satu aspek dalam hubungan bank dan politik. Keselarasan antara tujuan manajer dan kepentingan politik selama periode sebelum pemilu dapat mempengaruhi pengawasan otoritas bank. Jackowicz et al. (2011) menemukan bahwa tekanan politik tidak terdapat pada periode pemilu dan sebelum pemilu karena bank-bank BUMN memiliki pertumbuhan kredit yang lebih rendah dibandingkan bank asing. Namun, hasil studi mereka menemukan bahwa terdapat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi pada tahun-tahun sebelum pemilu dan selama pemilu dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Berdasarkan hipotesis tekanan politik, maka di Indonesia diharapkan hubungan positif antara pemilu dan pertumbuhan kredit, sehingga hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

Ha: Pemilu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit bank

Metode Penelitian

Sampel Penelitian

Penelitian ini mengambil data bank-bank di Indonesia periode Desember 2007 hingga Oktober 2014 pada bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Bank-

bank yang diobservasi mencakup seluruh bank umum baik yang telah *go public* maupun tidak dengan total 120 bank. Data spesifik bank diambil nilai rata-ratanya untuk dapat diregresikan ke model regresi runtut waktu. Total jumlah observasi selama periode penelitian menjadi 84 observasi. Data merupakan data sekunder berupa laporan keuangan bank dalam bulanan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Data inflasi, nilai tukar dollar AS diperoleh dari biro pusat statistik dan Statistik Perbankan Indonesia. Peristiwa politik diperoleh dari berbagai sumber berita. Kejadian Politik merupakan peristiwa pemilu mulai Desember tahun 2007 hingga Oktober 2014.

Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan beberapa variabel yang berkaitan dengan karakteristik bank, variabel makro ekonomi, variabel spesifik industri perbankan, dan variabel terikat pertumbuhan kredit. Deskripsi variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	Indeks Harga saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia	Rupiah	Nominal
Inflasi (INF)	Laju Inflasi	Persentase	Rasio
Nilai Tukar (ER)	Nilai tukar Rp/US \$	Rupiah	Nominal
Risiko Ketersediaan Modal (CAR)	Rasio modal dan aktiva tertimbang menurut risiko	Persentase	Rasio
Rasio Likuiditas (LR)	Rasio antara aset likuid dengan total aset	Persentase	Rasio
<i>Contagion</i> (CON)	Rasio antara pinjaman antar bank pada total pinjaman	Persentase	Rasio
<i>Bank Run</i> (BR)	Persentase penurunan dana pihak ketiga pada bank	Persentase	Rasio
<i>Political Event</i> (PE)	Variabel dummy pemilu 0 = tidak terjadi pemilu 1 = terjadi pemilu	Kategorikal	Nominal

Pertumbuhan Kredit (LG)	Persentase pertumbuhan kredit bank	Persentase	Rasio

Sumber: hasil kajian

Model Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan model penelitian sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 PE_t + \sum_{h=1}^4 \gamma_h X_{ht} \dots\dots\dots(1)$$

Variabel penelitian mencakup variabel penjelas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel penjelas yang utama adalah kejadian politik pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan kepala daerah. Variabel kontrol terdiri dari rasio kecukupan modal (CAR), rasio likuiditas (LR), Contagion (CONT), dan ketidakstabilan sistem keuangan atau Bank Run (BR). Variabel terikat adalah variabel pertumbuhan kredit (LG). Regresi yang dilakukan adalah regresi *time series*.

Berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan maka diharapkan koefisien variabel PE (β_1) adalah positif. Sedangkan koefisien CAR diharapkan negatif, rasio likuiditas (LR) diharapkan negatif, contagion (CONT) positif, dan bank run (BR) positif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh statistik deskriptif beberapa variabel seperti yang ditampilkan dalam tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut selama periode observasi diperoleh rata-rata rasio kecukupan modal perbankan

sebesar 17,8%, rasio likuiditas sebesar 79,9%. Sementara itu rata-rata bank run (penurunan dana pihak ketiga) sebesar 1,3% dan contagion (rasio pinjaman antar bank) sebesar 5,1%. Pertumbuhan kredit selama periode penelitian rata-rata pada level 1,6% dengan pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 4,8% dan terendah -2,3%. Kondisi ekonomi Indonesia digambarkan dengan IHSG sebesar Rp 3.485, dengan tingkat inflasi di level 6,1%, dan nilai tukar Rp 9.940. Pemilu terjadi cukup tinggi selama periode penelitian dengan rata-rata 0,607, mendekati 1. PE_fitted merupakan hasil *fitted value* regresi probit variabel-variabel indikator ekonomi terhadap variabel dummy pemilu. Regresi probit dilakukan untuk menemukan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kejadian pemilu di Indonesia. Hasil lengkap mengenai statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
PE	0,607	0,491	0	1
PE_fitted	0,605	0,241	0,095	0,956
CAR	0,178	0,012	0,159	0,216
LR	0,799	0,066	0,663	0,922
CONT	0,051	0,021	0,027	0,099
BR	0,013	0,017	-0,025	0,057
Pertumbuhan kredit (LG)	0,016	0,014	-0,023	0,048
IHSG	3485,52	1122,57	1241,54	5149,88
INF	0,061	0,024	0,009	0,119
ER	9940,52	1141,74	8508	12226

Hasil: data diolah

Pengujian Hipotesis

Sebelum tahapan pengujian hipotesis dilakukan pengujian korelasi terhadap variabel-variabel penelitian. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Koefisien Korelasi Variabel

	PE	PE_FITTED	CAR	CONT	LR	BR	LG
PE	1,00	0,53	-0,28	-0,07	0,05	0,09	0,22
PE_FITTED		1,00	-0,18	-0,14	0,08	-0,07	0,29
CAR			1,00	0,07	-0,09	-0,31	-0,25
CONT				1,00	-0,80	0,06	0,16
LR					1,00	-0,01	-0,04
BR						1,00	0,62
LG							1,00

Sumber: data diolah

Berdasarkan uji korelasi diperoleh hasil hubungan positif variabel kejadian politik pemilu terhadap pertumbuhan kredit. Selain itu CAR berhubungan negatif dengan pertumbuhan kredit, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kecukupan modal, akan semakin rendah pertumbuhan kredit. Variabel *contagion* (pinjaman antar bank) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit. Rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit. Hal ini berarti semakin tinggi rasio aset yang likuid terhadap total aset bank, akan semakin rendah pertumbuhan kredit. Berdasarkan hasil koefisien korelasi tidak terdapat variabel yang saling berkorelasi kuat.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi model (1) dan diperoleh hasil seperti yang terdapat dalam tabel 4. Pada tabel 4 variabel terikat adalah pertumbuhan kredit pada periode bulan pemilu, dan dua bulan sebelum dan setelah pemilu. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil bahwa selama pemilu terdapat peningkatan pertumbuhan kredit. Kejadian politik pemilu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit baik pada model yang melibatkan variabel kontrol dan tidak, kolom (1) hingga kolom (6).

Tabel 4. Regresi Determinan Pertumbuhan Kredit

Variabel Terikat \ Variabel Penjelas	LG (1)	LG (2)	LG _{t-1} (3)	LG _{t-2} (4)	LG _{t+1} (5)	LG _{t+2} (6)
PE (t-stat)	0,062** (2,02)	0.005* (1,91)	0,093*** (2,96)	0,006* (1,883)	0,008** (2,451)	0,006* (1,95)
CAR (t-stat)		-0.036 (-0,34)	-0,137 (-1,03)	-0,239 (-1,670)	-0,019 (-0,149)	0,209 (1,629)
LR (t-stat)		0.044 (1,45)	0,029 (0,78)	0,047 (1,229)	-0,0004 (-0,01)	-0,064* (-1,76)
CONT (t-stat)		0.209** (2.17)	0,1753 (1,468)	0,185 (1,54)	0,05 (0,413)	-0,121 (-1,05)
BR (t-stat)		0.478*** (6,545)	0,014 (0,149)	-0,205** (-2,128)	-0,278*** (-3,147)	-0,147* (-1,69)
Konstanta (t-stat)	0.012*** (5,12)	-0.032 (-0,916)	0,002 (0,047)	0,010 (0,23)	0,016 (0,37)	0,034 (0,80)
R ²	0,047	0,447	0,165	0,149	0,171	0,159
Jumlah Observasi	84	84	83	82	83	82

Sumber: data diolah

Hal ini didukung dengan studi terdahulu Jackowicz et al. (2011), Cole (2009), Dinç (2005) dan Micco et al. (2006, 2007). Hipotesis tekanan politik (*political pressure*) terdapat di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Jackowicz et al. (2011) pada negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur (CEE) seperti negara Ceko, Estonia, Kroasia, Hungaria, Lithuania dan lain-lain menemukan pengaruh signifikan pemilu parlemen terhadap pertumbuhan kredit. Studi tersebut juga menemukan pengaruh signifikan dari pemilu terhadap pertumbuhan kredit bahkan hingga satu tahun sebelum pemilu.

Penjelasannya adalah selama pemilu penawaran kredit semakin tinggi karena adanya kepentingan politik yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen bank. Selama kampanye pemilu tujuan manajemen dan kepentingan politik dapat

mempengaruhi supervisi dari otoritas keuangan. Pada konteks Indonesia terdapat pula fenomena meningkatnya kredit karena biaya kampanye kandidat yang tinggi. Hal ini disebabkan biaya politik di Indonesia yang tergolong mahal. Terdapat pula transaksi politik antara manajemen bank dan kandidat. Jika terpilih sebagai pemimpin daerah/anggota dewan/pemimpin negara, kandidat dapat memberi keuntungan bagi bank.

Sedangkan hasil studi yang mendukung dari perspektif demokrasi yang semakin meningkat di Indonesia adalah studi Barro (1996). Studi tersebut memprediksi Indonesia berada pada indeks demokrasi yang meningkat (0,00 pada 1994 menjadi 0,47 pada tahun 2000). Indonesia berada pada level demokrasi menengah, sehingga hipotesis meningkatnya pertumbuhan dari pemilu yang demokratis memberikan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Demokrasi diartikan sebagai hak politik untuk ikut bersuara dan berkompetisi untuk kantor publik dan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil regresi juga diperoleh bahwa efek pemilu terhadap pertumbuhan kredit dapat dirasakan oleh bank pada dua bulan sebelum pemilu dan dua bulan setelah pemilu. Selain kandidat yang menggunakan pinjaman sebagai modal untuk kampanye, terdapat juga pihak yang juga memperoleh peluang bisnis dari momen pemilu untuk memenuhi permintaan saat pemilu. Beberapa industri yang memenuhi permintaan dalam aktivitas pemilu antara lain: kertas dan percetakan, industri tekstil dan pakaian, transportasi dan telekomunikasi, industri manufaktur, hotel dan restoran, jasa iklan. Sementara itu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah sektor transportasi dan komunikasi, listrik, gas dan air bersih, jasa konstruksi, pertanian, dan keuangan.

Uji Robustness

Pada hasil uji hipotesis sebelumnya, penentuan kejadian pemilu dilakukan dengan memberi variabel dummy 1 pada bulan terselenggaranya pemilu, dan 0 untuk bulan dimana tidak terdapat pemilu. Berdasarkan model Probit maka dilakukan regresi determinan kejadian politik pemilu di Indonesia, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), inflasi, dan nilai tukar Rupiah/US\$. Hasil regresi probit tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Regresi Variabel Ekonomi Makro terhadap Pemilu

Variabel Independen	PE
IHSG (Z-stat)	0,0004** (2,89)
INF (Z-stat)	24,146*** (3,34)
ER (Z-stat)	-0,001*** (-3,88)
C (Z-stat)	3,18** (2,39)
Mc Fadden R ²	0,20
Jumlah observasi	84
Regresi probit variabel IHSG, inflasi (INF), dan nilai tukar (ER) terhadap pemilu (PE). Nilai di dalam kurung merupakan nilai Z. ***, **, * masing-masing menunjukkan koefisien signifikan pada tingkat signifikansi 1%, 5%, 10%.	

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan regresi probit, diperoleh bahwa kejadian politik pemilu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Semakin tinggi nilai inflasi, maka akan semakin tinggi peluang terjadinya pemilu. Selain itu pemilu juga terjadi pada saat level inflasi meningkat, dan nilai tukar yang menguat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi cenderung dalam keadaan baik saat pemilu terjadinya. Dari hasil regresi tersebut kemudian diambil *fitted value* yang menunjukkan probabilitas terjadinya pemilu berdasarkan faktor-faktor yang

mampu menjelaskannya. Variabel tersebut dalam penelitian ini diberi nama PE_fitted. Sebagai lanjutan dari proses regresi, kemudian nilai prediksi model probit untuk pemilu diregresikan. Regresi model (1) kemudian menghasilkan bukti empiris yang tidak jauh berbeda dari hasil pengolahan sebelumnya. Hasilnya ditampilkan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Regresi Pengaruh Pemilu terhadap Pertumbuhan Kredit Bank

Variabel Independen	LG (1)	LG (2)
PE_fitted (t-stat)	0,02*** (2,82)	0,022*** (4,83)
CAR (t-stat)		0,004 (0,04)
CONT (t-stat)		0,25*** (2,92)
LR (t-stat)		0,05* (1,89)
BR (t-stat)		0,52*** (7,85)
C (t-stat)	0,006 (0,17)	-0,06* (-1,83)
R ²	0,089	0,554
Jumlah Observasi	84	84
<p>Regresi pengaruh kejadian politik pemilu terhadap pertumbuhan kredit industri perbankan. Regresi variabel penjelas adalah fitted value pemilu, dan variabel kontrol: rasio kecukupan modal (CAR), <i>contagion</i> (pinjaman antar bank), rasio likuiditas (LR), dan risiko sistemik <i>bank run</i> (BR). Variabel dependen adalah pertumbuhan kredit. Kolom (1) menunjukkan pengaruh pemilu terhadap pertumbuhan kredit tanpa variabel kontrol. Kolom (2) merupakan regresi pemilu terhadap pertumbuhan kredit dengan variabel kontrol. ***, **, * menunjukkan signifikansi pada level 1%, 5%, dan 10%.</p>		

Sumber: data diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu berpengaruh signifikan pada pertumbuhan kredit industri perbankan. Pemilu berpengaruh positif, berarti pada masa pemilu terjadi peningkatan pertumbuhan kredit perbankan. Hal ini mendukung studi yang dilakukan oleh Dinç (2005), Cole (2009), dan Jackowicz et

al. (2011). Berdasarkan studi tersebut ditemukan bahwa ada intervensi politik terhadap pemberian kredit bank selama masa pemilu. Dalam studi Kumar (2014) di India, bank mengalami peningkatan kredit pada masa pemilu, khususnya kredit pertanian, dan mengorbankan kredit bagi industri. Hal ini terjadi disebabkan faktor politik. Para kontestan memanfaatkan bank untuk memperoleh suara dari para petani, sehingga menyebabkan semakin rendahnya kredit bagi perusahaan manufaktur. Berdasarkan studi terdahulu terdapat tekanan politik bagi industri perbankan yang menyebabkan pertumbuhan kredit meningkat.

Pada konteks Indonesia, hal ini mungkin terjadi sebab ada intervensi pemerintah terhadap kebijakan supervisi bank. Sehingga pada beberapa studi terdahulu ditemukan bahwa meskipun pertumbuhan kredit meningkat, tidak berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank (Jackowicz et al., 2011; Cole, 2009). Dalam studinya Cole (2009) menemukan bahwa kredit yang meningkat pada siklus pemilu tidak memberikan output bagi pertanian di India, sebab para politikus yang berkompetisi hanya mementingkan suara yang mampu memenangkan dirinya sendiri. Studi tersebut juga menemukan bahwa bank BUMN menjadi alat politik dalam pemilu sehingga bank tersebut memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan bank lainnya.

Penelitian ini kemudian menelusuri siklus pemilu yang terjadi di Indonesia dengan melakukan regresi pemilu terhadap pertumbuhan kredit sebelum dan setelah pemilu. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh fakta empiris yang dapat dilihat pada tabel 7. Pada tabel 7 diperoleh hasil kejadian politik yaitu pemilu meningkatkan pertumbuhan kredit secara signifikan hingga pada dua bulan sebelum pemilu, dan hingga empat bulan setelah pemilu. Hal ini dapat

dilihat pada kolom (1), (2), (3), (4), dan (5). Variabel hasil *fitted value* pemilu positif dan signifikan hingga periode 5 bulan setelah pemilu. Hal ini mendukung prediksi bahwa kontes politik pemilihan umum memberikan keuntungan bagi industri keuangan. Namun keuntungan dari tingginya pertumbuhan kredit harus diuji kembali apakah meningkatkan profitabilitas bank atau sebaliknya.

Tabel 7. Pengaruh Pemilu terhadap Pertumbuhan Kredit Sebelum dan Sesudah Pemilu

Variabel Independen	LG _{t-1} (1)	LG _{t-2} (2)	LG _{t+1} (3)	LG _{t+4} (4)	LG _{t+5} (5)
PE_fitted	0,02*** (2,97)	0,02*** (2,86)	0,02*** (3,49)	0,02*** (3,19)	0,01* (1,94)
CAR	-0,16 (-1,24)	-0,23* (-1,72)	-0,01 (-0,12)	0,17 (1,41)	0,24* (1,92)
CONT	0,20* (1,68)	0,22* (1,84)	0,08 (0,74)	-0,27** (-2,55)	-0,37*** (-3,46)
LR	0,03 (0,91)	0,05 (1,41)	0,01 (0,16)	-0,13*** (-3,65)	-0,15*** (-4,26)
BR	0,05 (0,49)	-0,17* (-1,79)	-0,24*** (-2,78)	-0,13 (-1,53)	0,08 (0,94)
C	-0,01 (-0,11)	-0,004 (-0,10)	-0,0001 (-0,003)	0,09** (2,13)	0,11** (2,39)
R ²	0,165	0,196	0,228	0,307	0,287
Jumlah observasi	83	82	83	80	79

Regresi pengaruh kejadian politik pemilu terhadap pertumbuhan kredit sebelum dan sesudah pemilu. Variabel independen pemilu (PE_fitted) merupakan hasil fitted value model probit pemilu. Variabel kontrol rasio kecukupan modal, contagion, rasio likuiditas, dan bank run. Variabel dependen pertumbuhan kredit (CG) sebelum dan sesudah pemilu. ***, **, * signifikan pada 1%, 5%, dan 10%.

Sumber: data diolah

Kesimpulan dan Saran

Studi ini mencoba menguji perilaku bank pada masa pemilu sebagai bagian dari peristiwa politik yang penting dalam suatu negara. Penelitian melibatkan

seluruh bank yang beroperasi di Indonesia selama Desember 2007 hingga November 2012. Pemilu yang diobservasi tidak terbatas pada pemilu presiden, namun juga pemilihan kepala daerah, dan anggota legislatif. Pemilu diukur dengan variabel dummy dan hasil regresi probit beberapa indikator ekonomi seperti IHSG, inflasi, dan nilai tukar. Pemilu terjadi cenderung saat kondisi ekonomi dalam keadaan baik.

Perilaku politik para kandidat dan biaya politik yang tergolong tinggi menyebabkan terjadinya pertumbuhan kredit di industri keuangan. Selain itu dengan adanya pemilu terdapat beberapa sektor yang memperoleh keuntungan dengan memenuhi permintaan pada masa sebelum pemilu, saat pemilu, dan pasca pemilu. Studi terdahulu menemukan bahwa di beberapa negara terdapat pola perilaku yang berbeda dalam industri perbankan saat pemilu. Perilaku ini signifikan pada masa sebelum, saat pemilu, dan setelah pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun pada periode penelitian terjadi gejolak dalam industri perbankan, namun terdapat pengaruh positif pemilu terhadap pertumbuhan kredit bank. Kejadian politik yang terjadi saat kondisi ekonomi yang baik mampu mendorong pertumbuhan kredit industri perbankan. Hal ini konsisten pada model yang melibatkan variabel kontrol risiko sistemik (*contagion* dan *bank run*) dan variabel spesifik bank. Meningkatnya kredit bank terjadi dua bulan sebelum pemilu, pada masa pemilu, dan dua bulan setelah pemilu.

Penelitian ini menggunakan data yang terbatas pada pertumbuhan kredit, namun untuk menguji hipotesis tekanan politik (*political pressure*) dalam industri perbankan perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Beberapa studi menemukan

bahwa para politikus memanfaatkan bank untuk mendanai kampanye mereka demi kepentingan politik. Pada sisi lain bank juga memiliki kepentingan khusus berkaitan dengan supervisi dari pemerintah ketika calon kandidat yang didukung memenangkan pemilihan umum. Pertumbuhan kredit yang meningkat tidak didukung meningkatnya profitabilitas bank.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Simon, J., Robinson, J.A., Yared, P., 2008. Income and Democracy. *American Economic Review* 98 (3), 808-842.
- Barro, R.J., 1996. Democracy and Growth. *Journal of Economic Growth* 1, 1-27.
- Baum C.F., Caglayan, M., Talavera, O., 2009. Parliamentary Election Cycles and the Turkish Banking Sector. *Journal of Banking and Finance* 34, 2709-2719.
- Cole, S., 2009. Fixing Market Failures or Fixing Elections? Agricultural Credit in India. *American Economic Journal: Applied Economics* 1, 219-250.
- Dinç, I. S., 2005. Politicians and Banks: Political Influence on Government-owned Banks in Emerging Markets. *Journal of Financial Economics* 77: 453-479.
- Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozłowski, L., 2011. The Impact of Electoral Factors on Commercial Banks in CEE Countries. *Warsaw University Working Paper*.

- Kumar, N., 2014. Political Interference on Firms: Effect of Elections on Bank Lending in India. *Unpublished Working Paper University of Chicago Seminar*.
- Maududy, I., 2015. Pilkada Serentak dalam Perspektif Ekonomi. *Artikel Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI*.
- Micco, A., Panizza, U., Yanez, M., 2007. Bank Ownership and Performance. Does Politics Matters?. *Journal of Banking and Finance* 31, 219-241.
- Moricz, S., Sjöholm, F., 2014. The Effect of Elections on Economic Growth: Results from a Natural Experiment in Indonesia. *IFN Working Paper No.1023*.
- Tavares, J., Romain, W., 2001. How Democracy Affects Growth. *European Economic Review* 45, 1341-1378.